

## RINGKASAN

M. Hadi, NIM : 202402020376 Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek, Pembimbing I : Dr. Imam Fachruddin, M.Si., Pembimbing II : Dr. Teguh Pramono, M.Si

Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian integral dari prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, pejabat eksekutif terkait, serta observasi dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan APBD. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Trenggalek telah menjalankan fungsi pengawasannya melalui berbagai mekanisme, termasuk rapat komisi, penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Pengawasan ini mencakup seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti keterbatasan wewenang DPRD dalam memberikan sanksi langsung kepada pihak eksekutif jika terjadi penyimpangan, serta tantangan dalam optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di internal DPRD untuk melakukan analisis anggaran yang mendalam.

Kesimpulannya, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Trenggalek terhadap APBD berjalan, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui penguatan aspek kelembagaan dan peningkatan kapasitas anggota dewan. Rekomendasi yang diajukan antara lain adalah mendorong sinergi yang lebih baik dengan lembaga pengawas fungsional seperti BPK dan Inspektorat Daerah, serta optimalisasi peran masyarakat sipil dalam mengawal transparansi anggaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, DPRD, APBD, Akuntabilitas**

## SUMMARY

M. Hadi, Student ID Number: 202402020376 The Regional People's Representative Council's Oversight Function Over the Regional Revenue and Expenditure Budget of Trenggalek Regency, Supervisor I: Dr. Imam Fachruddin, M.Si., Supervisor II: Dr. Teguh Pramono, M.Si.

The Regional People's Representative Council's Oversight Function Over the Regional Revenue and Expenditure Budget of Trenggalek Regency. This study aims to analyze and evaluate the effectiveness of the Regional People's Representative Council (DPRD)'s oversight function over the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The DPRD's oversight function is an integral part of the principle of checks and balances in regional governance, which aims to ensure that regional financial management is transparent, accountable, and in accordance with applicable laws and regulations.

The research method used was a qualitative descriptive method with a case study approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with leaders and members of the Trenggalek Regency Regional People's Representative Council (DPRD), relevant executive officials, and observations of regional budget planning and reporting documents. Secondary data were obtained from literature studies, laws and regulations, and other relevant official documents.

The results indicate that the Trenggalek Regency DPRD has carried out its oversight function through various mechanisms, including commission meetings, the use of the right of interpellation, the right of inquiry, and discussions of the Regional Head's accountability report (LKPD). This oversight encompasses the entire budget cycle, from planning, budgeting, implementation, to reporting and accountability for regional finances.

However, this study also identified several obstacles, such as the limited authority of the DPRD in providing direct sanctions to the executive if deviations occur, as well as challenges in optimizing the capacity of human resources within the DPRD to conduct in-depth budget analysis.

In conclusion, the Trenggalek Regency DPRD's oversight function over the regional budget (APBD) is functioning effectively, but its effectiveness needs to be improved by strengthening institutional aspects and increasing the capacity of council members. Recommendations include encouraging better synergy with functional oversight institutions such as the Supreme Audit Agency (BPK) and the Regional Inspectorate, as well as optimizing the role of civil society in overseeing budget transparency to achieve good governance.

**Keywords : Supervisory Function, DPRD, APBD, Accountability**